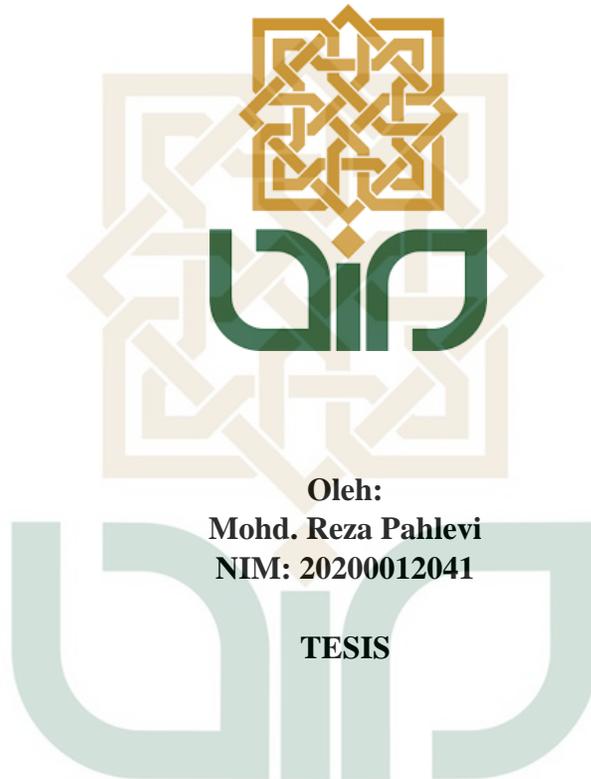


KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGATASI KEMISKINAN



Oleh:

Mohd. Reza Pahlevi

NIM: 20200012041

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Yogyakarta

2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1253/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGATASI KEMISKINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHD. REZA PAHLEVI, S.Sos

Nomor Induk Mahasiswa : 20200012041

Telah diujikan pada : Selasa, 13 Desember 2022

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 63a290295f1f0



Penguji II

Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 63a28ebc0f42f



Penguji III

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 639fda7b3c4f9



Yogyakarta, 13 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a2b04f0b877

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohd. Reza Pahlevi
NIM : 20200012041
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN ALI RAJAGA
YOGYAKARTA



Mohd. Reza Pahlevi
NIM. 20200012041

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd. Reza Pahlevi
NIM : 20200012041
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Mohd. Reza Pahlevi

NIM. 20200012041

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGATASI KEMISKINAN

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohd. Reza Pahlevi
NIM : 20200012041
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (M.A.)

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
NIP. 197005281994031002

ABSTRAK

Aceh merupakan provinsi paling ujung barat Indonesia yang mempunyai keistimewaan yaitu menjadi daerah otonomi khusus. Sejak awal dana otsus dialiri ke provinsi Aceh, 96 Triliun terhitung sampai dengan saat ini namun berbagai masalah juga belum dapat diselesaikan di Aceh seperti permasalahan kemiskinan. Data menyebutkan bahwa Aceh merupakan salah-satu provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi. Padahal jika melihat dari sisi anggaran untuk pendukung pembangunan, sudah seharusnya kemiskinan terselesaikan di Aceh. Tentunya fenomena ini menjadi suatu permasalahan terkhusus dari sisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Aceh.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana kebijakan pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan. *Kedua*, Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, mendeskripsikan kebijakan pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan. *Kedua*, mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan yaitu: *Pertama*, pemerintah Aceh telah mengambil berbagai kebijakan dalam mengatasi kemiskinan. Kebijakan yang diambil berbentuk kedalam dua strategi yaitu strategi utama dan strategi khusus. Strategi utama yaitu (1) Mengurangi beban penduduk miskin, (2) Meningkatkan pendapatan penduduk miskin, (3) Memperkuat kapasitas penduduk miskin, (4) Menekan biaya transaksi ekonomi, (5) Menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok. Adapun strategi khusus yaitu: Tepat Fokus, Tepat Lokus, Tepat Modus, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu. *Kedua*, kebijakan tersebut kemudian akan diimplementasikan oleh pemerintah Aceh. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk program yang dijalankan oleh pemerintah Aceh, dalam hal ini pelaksana kebijakan seperti SKPA, Legislatif dan *stakeholder* lainnya. Agenda kebijakan ini yang dibungkus dalam berbagai program dilaksanakan berdasarkan indikator kemiskinan yaitu Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pangan dan Infrastruktur Dasar.

Kata Kunci: *Kebijakan, Kemiskinan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Mengatasi Kemiskinan”. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-Nya.

Penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister pada Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam proses penyusunan tesis ini, terdapat berbagai kendala dan hambatan sehingga penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini tidak dapat lepas dari bantuan, dorongan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang selama ini mendukung proses penelitian dan penyusunan tesis ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh mahasiswa.
2. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai motivasi dan dorongan kepada mahasiswa pascasarjana.
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung dan membantu para mahasiswa dalam proses pembelajaran.
4. Najib Kailani S.Fil.I., M.A., Ph. D selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam perkuliahan.
5. Dr. Aziz Muslim, M.Pd selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.

6. Ibunda Hj. Mariani yang telah mengajarkan arti ketulusan tak berpamrih dan Ayahanda H. Yuswar, SE yang dengan terang benderang memperlihatkan arti konsistensi terhadap sebuah pilihan.
7. Abangda dr. Yasir Fadillah yang telah mendukung dan mendorong agar terselesaikannya pendidikan magister. Terimakasih kepada Adinda Badrul Novis dan Muhammad Abrar yang telah memberikan semangat kepada saya untuk terus mengejar cita-cita.
8. Keluarga besar yang mensupport terhadap mimpi yang dicita-citakan.
9. Kepada Adinda Widia Astuti, S.Pd, M.Pd yang senantiasa memberikan berbagai dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
10. Kepala dan anggota TKP2K Aceh (Bappeda) yang membantu terhadap penelitian ini.
11. Teman seperjuangan saya Rizki Mubarak Alkam S.Sos, Rahmad Mulki, S.Sos, Foza Al Munib, S.Sos, M. Ilham Vardian, SE, M. Reza Fahlevi yang selalu mendukung dan mengajarkan arti perjuangan dalam sebuah mimpi.
12. Teman seperjuangan Muhammad Zikri, S.Pd., M.A, Dede Adistira, S.Sos., M.A, Agus Junaidi, S.H., M.H.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY).
14. Seluruh pihak yang mendukung terselesaikannya studi magister yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

Tesis ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna dan baik dari segi penulisan maupun analisisnya. Oleh karena itu, terbukanya kritik dan saran guna penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Penulis,



Mohd. Reza Pahlevi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kepada Ibunda Hj. Mariani yang telah mengajarkan arti ketulusan tak berpamrih dan untuk Ayahanda H. Yuswar, SE yang dengan terang benderang memperlihatkan arti konsistensi terhadap suatu tujuan. Kepada abang dan adik yang telah ikut serta mendukung serta mendoakan setiap saatnya. Teruntuk Widia Astuti yang dengan tulus kebersamai dalam penyelesaian studi ini. Persembahkan juga kepada seluruh teman seperjuangan yang mendukung setiap langkah dalam menuju mimpi yang dicita-citakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jika engkau ingin mengenal dunia, maka bacalah. Namun, jika engkau ingin dikenal dunia, maka menulislah.

(Pramoedya Ananta Toer)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	21
A. Kebijakan Publik.....	21
B. Kemiskinan	39
C. Kebijakan Dalam Mengatasi Kemiskinan.....	42
BAB III KONDISI UMUM PROVINSI ACEH.....	44
A. Letak Geografi, Topografis dan Demografi.....	44
B. Ekonomi Aceh	52
C. Profil Kemiskinan Aceh.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Determinan dan Arah Kebijakan Penanganan Kemiskinan Aceh.....	73

B. Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Mengatasi Kemiskinan.....	85
C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Mengatasi Kemiskinan	104
D. Pembahasan	116
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	131



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan Menurut Nugroho	30
Gambar 2.2 Model Dasar Proses Kebijakan	33
Gambar 2.3 Proses Analisi Kebijakan	33
Gambar 2.4 Problem-Centered Policy Analysis Menurut Dunn.....	35
Gambar 2.5 Proses Kebijakan Menurut Dunn	36
Gambar 2.6 Proses Analisis Kebijakan Menurut Dunn	38
Gambar 3.1 Nilai PDRB ADHB Aceh Tahun 2015-2018.....	53
Gambar 3.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh	57
Gambar 3.3 PDRB Perkapita ADHB Aceh 2014-2018	59
Gambar 3.4 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (RP) Provinsi Aceh Tahun 2015-2018	63
Gambar 3.5 Perkembangan dan Laju Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita.....	68
Gambar 4.1 Kebijakan dan Strategi Utama Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Aceh.....	92
Gambar 4.2 Kebijakan dan Strategi Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Aceh.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahapan Kebijakan	38
Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Berdasarkan Kemiringan	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Aceh	48
Tabel 3.3 Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Kelompok.....	48
Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Se-Sumatera Tahun 2015-2017 (Persen).....	54
Tabel 3.5 Laju Inflasi Provinsi Aceh tahun 2017-2021	56
Tabel 3.6 Nilai Tukar Petani (NTP) pada Kelompok Sub Sektor Pertanian, 2014-2018	58
Tabel 3.7 Daftar Komuditi Maret 2018	66
Tabel 3.8 Pengeluaran Rata-Rata Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh 2014-2018.....	67
Tabel 3.9 Persentase pengeluaran makanan dan non makanan Perkapita Aceh 2012-2016.....	67
Tabel 3.10 Dimensi dan Indikator Utama Kemiskinan.....	71
Tabel 4.1 Determinan Kemiskinan Aceh Secara Umum	76
Tabel 4.2 Theory of Change (Toc) Kemiskinan Secara Umum	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin suatu negara harus mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa dalam kehidupan ekonominya dengan berbagai kebijakan dan terobosan yang dilaksanakan Pemerintah. Hal ini merupakan proses dalam meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan menjadi suatu persoalan global yang dihadapi oleh setiap negara dunia dalam menuju kesejahteraan penduduknya.¹ Masalah kemiskinan menjadi fokus penting di Indonesia, pemerintah selaku pemangku kebijakan terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan dikarenakan kemiskinan dapat memunculkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya ditengah kehidupan masyarakat.² Sejauh ini, masalah kemiskinan menjadi pembahasan hangat dan menjadi suatu pokok bahasan penting semenjak era kolonial Belanda. Saat itu, pengentasan kemiskinan diatasi dengan berbagai program anti kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang disebut “*Politik Etis*”.³

Kemiskinan adalah konsep yang multidimensional, hal ini dikarenakan kemiskinan mempunyai berbagai dimensi dalam kehidupan sehingga juga sering disebut bahwa kemiskinan mempunyai konsep berdimensi ganda yang memuat

¹ L N Nasution, D P Nasution, and A I F Lubis, ‘Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara’, *JEpa*, 5.1 (2020), 1–5; 73.

² Erwan Agus Purwanto, ‘Mengkaji Potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10.3 (2007), 295-296.

³ Itang, ‘Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan’, *Tazkiya*, 16.1 (2015), 1–30, 4.

dimensi ekonomi, politik serta dimensi sosial - psikologis.⁴ Jika ditinjau dari sisi dimensi ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya sumberdaya yang bisa dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta terjaminnya kesejahteraan umat manusia. Kemiskinan dalam kacamata politik dapat dikaji melalui tingkat akses terhadap kekuasaan ataupun yang sering disebut dalam konsep sistem politik dimana dapat dipergunakan dalam melihat kemampuan dan mengakses sumberdaya yang ada.

Adapun kemiskinan dalam kacamata dimensi sosial psikologis yaitu kemiskinan dari sisi kurangnya akses dan tatanan kehidupan sosial yang mendukung untuk proses meningkatkan produktivitas. Pada bidang ini, terjadinya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat seseorang dalam memanfaatkan kesempatan dalam lingkungan kehidupan masyarakat.⁵

Berbagai upaya pemerintah dalam kebijakannya menanggulangi kemiskinan telah dimulai sejak orde baru. Tahun 1976 sampai dengan tahun 1996 ataupun yang sering disebut dengan repelita II-V, Indonesia mengalami penurunan kemiskinan secara drastis dari 40 persen pada repelita II menjadi 11 persen diawal repelita V. Hal ini menjadi keberhasilan negara dalam melakukan berbagai pembangunan bidang ekonomi. Selama tiga dekade, pertumbuhan ekonomi negara diatas 7 persen setiap tahunnya. Pencapaian gemilang tersebut menarik perhatian dunia dan negara mendapat

⁴ Abu Huraerah, 'Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12.1 (2013), 3-4.

⁵ Huraerah, Strategi Kebijakan Penanggulangan, 3-4.

berbagai pujian atas pencapaian dalam mengurangi angka kemiskinan. Sebagai contoh, laporan dari World Bank “*The East Asian Miracle*”, Indonesia menempati posisi sebagai salah-satu macan Asia yang dimuat dalam “*The High Performing Asian Economies (HPAEs)*” dimana sejajar dengan negara Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Taiwan.⁶

Tidak berselang lama laporan dari Wolrd Bank tersebut, tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi. Awalnya, krisis ini hanya sekilas tentang menurunnya rupiah terhadap dolar Amerika, akan tetapi berlanjut dengan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah hingga terjadinya krisis politik yang ditandai dengan jatuhnya kepemimpinan presiden Soeharto pada 1998. Krisis moneter tersebut kemudian membesar hingga terjadinya krisis total yang melanda dalam semua aspek kehidupan masyarakat.⁷

Di Indonesia, terhitung pada Maret 2020, 26,42 juta jiwa masyarakat masih berada dalam kemiskinan. September 2020, penduduk miskin meningkat mencapai 27,54 juta jiwa. Sedangkan pada September 2021, penduduk miskin berkurang ke angka 26,50 juta jiwa. Secara persentase masyarakat yang dilanda miskin di Indonesia pada periode Maret sampai September 2021 turun sebanyak 0,43% menjadi 9,71%.⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin menurun. Namun, persoalan

⁶ Purwanto, Mengkaji Potensi Usaha, 296.

⁷ Purwanto, Mengkaji Potensi Usaha. 296.

⁸ Badan Pusat Statistik Aceh, ‘Profil Kemiskinan Penduduk Di Provinsi Aceh Maret 2022’, *BPS Aceh*, 2022 [Diakses pada 6 March 2022].

kemiskinan ini masih menjadi persoalan besar negara untuk dapat mengatasinya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Menurunnya angka kemiskinan nasional periode 2020-2021 menjadi satu terobosan negara dalam hal keseriusan mengatasi persoalan kemiskinan. Angka kemiskinan nasional tersebut diperoleh berdasarkan data setiap provinsi. Namun, tidak semua provinsi berhasil menekan angka kemiskinan, justru pertahunnya ada provinsi yang angka kemiskinannya terus meningkat seperti provinsi Aceh yang terkenal dengan daerah otonomi khusus yang melimpah sumberdaya alamnya.

Persoalan kemiskinan di Aceh pada hakikatnya patut dipertanyakan, daerah yang diberikan otonomi khusus serta kaya akan sumberdaya alamnya justru terpuruk dalam persoalan kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, terhitung pada Maret 2020, angka kemiskinan provinsi Aceh mencapai 814 ribu jiwa (14,99 persen), kemudian juga bertambah sebesar 5 ribu jiwa dibandingkan dengan masyarakat miskin pada September 2019 yang jumlahnya 809 ribu orang (15,01 persen). Jika dilihat pada september 2020, angka kemiskinan bertambah menjadi 833 ribu jiwa, meningkat hingga 19 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2021, jumlah masyarakat miskin naik menjadi 834 ribu orang dan meningkat drastis pada September 2021 mencapai 850 ribu orang.⁹

Melalui paparan diatas, penulis berasumsi bahwa masih terdapat hambatan besar dalam mengatasi kemiskinan terutama di provinsi Aceh yang justru pernah menjadi

⁹ Badan Pusat Statistik Aceh.

daerah yang menyumbangkan hasil gas alamnya kepada setiap provinsi di Indonesia dan saat ini bergelut melawan kemiskinan. Pemerintah sudah sepatutnya mencari solusi melalui kebijakan yang dapat menekan angka kemiskinan tersebut.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara spesifik tentang **“Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Mengatasi Kemiskinan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis merangkum beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merangkum beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan.
2. Untuk mengetahui tindakan politik apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan?

Persoalan kemiskinan di Aceh menjadi satu fenomena dikarenakan Aceh merupakan daerah otonomi khusus dan memiliki sumberdaya alam yang begitu besar. Melihat kemiskinan melalui kebijakan merupakan satu korelasi yang signifikan untuk

dibedah dalam penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk dapat mengakses bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Dalam berbagai penelitian yang dilaksanakan, terdapat pula manfaat-manfaatnya, demikian juga dengan tulisan ini yang memiliki manfaat dan dapat dikelompokkan menjadi 2 manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat teoristis

Dalam proses penelitian ini, menghasilkan berbagai temuan-temuan yang diharapkan menjadi suatu literatur dan pengetahuan terkait dengan kebijakan yang diambil dan diimplementasikan oleh Pemerintahan Aceh demi menyelesaikan persoalan kemiskinan yang dilihat dari berbagai faktor baik dari kacamata pendidikan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan dan lain sebagainya yang bermuara kepada agenda mengentas kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi suatu kajian yang bisa menumbuh kembangkan pola berpikir penulis terhadap kebijakan yang khususnya mengenai Kebijakan Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu ilmu yang dapat menambah wawasan penulis, kemudian juga diharapkan sebagai masukan dan

evaluasi bagi Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama dalam aspek ekonomi.

E. Kajian Pustaka

Dalam proses penulisan ini, terdapat beberapa penelitian dan tulisan mengenai Kebijakan dalam Mengatasi Kemiskinan. Maka oleh karenanya, penulis akan mengkaji terkait dengan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dalam penulisan ini. Berikut beberapa tulisan dan kajian terhadap kebijakan dalam mengatasi kemiskinan.

1. Kebijakan dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Tema ini telah ditulis dan dikaji sehingga dapat melahirkan pemikiran dan berbagai terobosan dalam persoalan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Abu Huraerah yang berjudul Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 12, No. 1, Juni 2013.¹⁰ M. Dul Baykin yang menulis tentang Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Muhammadiyah Di Pulau Lombok NTB pada *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 6, No. 13, 2022.¹¹ Tulisan karya Shinta Yuniana Pertiwi yang berjudul Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dalam *Jurnal Pandecta* Vol. 9 No. 2, 2014.¹² Tulisan karya Rah Adi Fahmi Ginanjar, dkk. Tulisan yang berjudul Analisis Strategi Penanggulangan

¹⁰ Huraerah, Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, 1–13.

¹¹ M Dul Baykin dan Dini Widinarsih, “Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Muhammadiyah Di Pulau Lombok Ntb Kajian Literatur,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6.3 (2022), 10227–10247.

¹² Shinta Yuniana Pertiwi, “Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan,” *Pandecta: Research Law Journal*, 9.2 (2014), 212–225.

Kemiskinan Di Provinsi Banten dalam *Jurnal Ekonomi-Qu* Vol. 8 No. 2, 2018.¹³ Tulisan karya Johan Arifin yang berjudul Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia yang dimuat dalam *jurnal Sosio Informa* Vol. 6 No. 2, 2020.¹⁴ Tulisan Karya P. Eko Prasetyo yang berjudul Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, dimuat dalam *Jurnal Akmenika UPY* Vol. 2, 2008.¹⁵ Tulisan karya Irwan Abdu Nugraha yang menulis tentang Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Politik* Vol. 8 No. 2, 2017.¹⁶ Tulisan karya Sujana Royat yang menulis tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan, dalam *Jurnal Deputy Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan* No. 1, 2007.¹⁷

Adapun dalam beberapa tulisan diatas, menjelaskan tentang masih terjadinya kesalahan dalam strategi kebijakan mengatasi kemiskinan. selanjutnya, penanggulangan dalam mengatasi kemiskinan oleh pemerintah masih kurang efektif. Seharusnya, pemerintah tidak hanya memfokuskan perhatiannya dibidang ekonomi saja dikarenakan persoalan kemiskinan merupakan aspek multidimensi. Kemudian

¹³ Ginanjar Rah Adi Fahmi, Sugeng Setyadi, dan Umayatu Suiro, “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8.2 (2018), 227–248.

¹⁴ Johan Arifin, “Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,” *Sosio Informa*, 6.2 (2020), 114–132.

¹⁵ P. Eko Prasetyo, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran,” *Akmenika UPY*, 2 (2008), 1–13.

¹⁶ Irwan Abdu Nugraha, “Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmu Politik*, 2017, 19–29.

¹⁷ Sujana Royat, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan,” *Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*, 1, 2007, 41–51.

tulisan diatas juga membahas tentang pemerintah seharusnya melakukan pembekalan dasar bagi masyarakat miskin seperti pemberdayaan UMKM dan sebagainya serta diperlukannya juga untuk melibatkan masyarakat miskin dalam proses mengatasi kemiskinan. Pemerintah dapat mengambil kebijakan strategi pemberdayaan yang dianggap dapat menjadi suatu kebijakan yang efektif.

Pembahasan diatas memiliki persamaan dengan kajian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai kebijakan dalam mengatasi kemiskinan. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian yang penulis lakukan bersifat spesifik ke provinsi Aceh dan ingin melihat dari sudut kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sedangkan penelitian diatas menjelaskan tentang kebijakan secara umumnya.

2. Evaluasi dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tema ini telah banyak dikaji secara spesifik untuk melihat bagaimana implementasi tentang kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Tulisan karya M. Nur Rianto Al-Arif yang berjudul Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Indo-Islamika*, Volume 2 Nomor 1, 2012.¹⁸ Tulisan karya Reza Fachrudin yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan, dimuat dalam jurnal *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 4 No. 2, 2015.¹⁹ Tulisan karya Nisa Agistiani

¹⁸ M Nur Rianto dan Al Arif, "Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Asy-Syir'ah*, 2.1 (2012), 17–29.

¹⁹ Reza Fachrudin, "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan," *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 4.2 (2015), 327–338.

Rachman yang menulis tentang Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut, dimuat dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 18 No. 2, 2014.²⁰ Tulisan karya Muhammad Ardian, dkk. Tulisan tersebut berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Politik yang dimuat dalam Jurnal Perspektif Vol. 10 No. 2, 2021.²¹ Tulisan karya Muhammad Sulhan, dkk. Tulisan yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kertu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang), dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1, 2017.²² Tulisan karya Iwan Satibi, dkk. Tulisan dengan judul Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2, 2019.²³

Dalam tulisan diatas, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dalam berbagai bentuk agenda merupakan suatu hal yang bersifat penting dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjutnya, pembahasan diatas menguraikan

²⁰ Nisa Agistiani Rachman, "Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18.2 (2014), 147–160.

²¹ Muhammad Ardian dan Arief Marizki Purba, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Politik," *Perspektif*, 10.2 (2021), 543–554.

²² Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kertu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6.1 (2017), 15–18.

²³ Iwan Satibi dan Undang Sudrajat, "Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO)*, 9.2 (2019), 362–381.

tentang penerapan kebijakan dalam menyelesaikan kemiskinan, ditempuh dengan berbagai macam agenda kebijakan seperti memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, penyeluran wakaf, kartu jaminan sosial dan KIP dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan bagaimana mengatasi kemiskinan demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu didalam tulisan diatas menjelaskan tentang mengentas kemiskinan melalui program-program yang ditempuh namun membahas secara umum, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik membahas tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, ditinjau dari berbagai kebijakan yang diambil hingga turunan kebijakan tersebut. Disisi lain, tulisan dalam 2 (dua) tema diatas belum menjelaskan tentang spesifik tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, hanya membahas secara umum, sehingga penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan belum disentuh atau dibahas secara komprehensif.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritik juga dapat disebut sebagai salah-satu perangkat yang diperlukan dalam membantu memberikan penjelasan seputar rumusan masalah. Berangkat dari hal tersebut, maka teori dan metode mempunyai suatu poin yang bersifat urgent dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam suatu kajian. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pemerintah Aceh dalam

mengatasi kemiskinan, maka teori Teori Kebijakan Publik memiliki suatu korelasi yang kuat terhadap penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut antara lain yaitu Teori Kebijakan Publik.

William Dunn menjelaskan bahwa *Policy Issue* ialah sebuah produk yang menjadi suatu acuan dalam proses penyelesaian suatu permasalahan tertentu. Adapun tahapan-tahapan dalam proses perumusan suatu kebijakan publik perspektif William Dunn antara lain yaitu:²⁴

1. Penyusunan Acara

Penyusunan acara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan, hal ini dikarenakan pada tahapan ini, berbagai isu dalam kehidupan publik akan dibahas dalam agenda tersebut. Semua isu yang masuk akan dinilai, maksudnya yaitu terkait dengan isu apa yang penting untuk segera dilaksanakan dan isu mana yang bisa dibahas dan dikaji pada periode lainnya. Pada tahapan ini, merupakan tahapan awal dalam menentukan permasalahan apa yang akan segera dibahas yang bertujuan untuk pengambilan kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahapan kedua dalam pembuatan kebijakan. Dalam tahapan ini, berbagai isu yang telah dibahas dan disaring pada tahapan awal akan dibahas kembali guna untuk mendapatkan solusi-solusi penyelesaian

²⁴ William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1998), 24.

permasalahan. Proses ini akan menghasilkan solusi-solusi yang ditawarkan guna memecahkan permasalahan dalam kehidupan publik.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan tahapan adopsi kebijakan ataupun legitimasi kebijakan adalah sebagai proses atau agenda adopsi kebijakan merupakan tahapan dalam mengambil suatu kebijakan setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Dalam tahapan ini, pemerintah mengambil suatu kebijakan terbaik berdasarkan berbagai solusi yang telah ditawarkan pada tahapan penyusunan agenda dan formulasi kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan

Pada tahapan ini, keputusan program kebijakan yang dianggap menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang menjadi agenda kebijakan harus diimplementasikan. Program tersebut diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun pelaksana kebijakan lainnya dengan memobilisasikan sumberdaya manusia dan finansial.²⁵

5. Evaluasi Kebijakan

Tahapan evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir dalam kebijakan publik. Tahapan ini membahas tentang kebijakan yang telah diambil untuk dapat dinilai dan dikaji kembali. Tahapan ini akan melihat sejauh mana efektivitas kebijakan yang telah dibuat. Dapat juga disebutkan bahwa dalam tahapan evaluasi ini, kebijakan akan dinilai apakah sudah terarah dan sukses dilaksanakan ataupun kebijakan tersebut tidak efektif

²⁵ Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 24.

terhadap permasalahan publik tadinya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan apakah kebijakan dapat dilanjutkan ataupun akan dikaji dengan menghasilkan kebijakan lainnya.²⁶

Berpijak dari Teori Kebijakan diatas, penulis melihat bahwa ada korelasi yang kuat dan menjadi pisau untuk menganalisis kebijakan pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan. Secara teoritis, dalam teori kebijakan dapat menjawab persoalan dalam penelitian melalui proses pengambilan kebijakan itu sendiri, baik secara perencanaan kebijakan sampai kepada tahapan evaluasi kebijakan. Teori yang telah penulis uraikan diharapkan dapat menjadi pendukung untuk melihat Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Mengatasi Kemiskinan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk mengkaji tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat melahirkan berbagai data-data deskriptif yang bersumber dari berbagai data tertulis, lisan dari objek yang diamati. Data yang akan dikaji dalam penelitian ini bersumber dari hasil studi lapangan (*field reasearch*) dan kajian kepustakaan (*library researh*). Penulis akan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, artikel jurnal, media cetak dan media online serta sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.²⁷ Dengan menggunakan metode ini, penulis

²⁶ Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 24.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 26.

akan melihat dan mengkaji berbagai fenomena yang terjadi dilapangan dan akan menganalisanya dengan teori yang penulis tetapkan.

1. Sumber Data

Untuk menghasilkan data yang valid terhadap penelitian yang penulis lakukan, maka terdapat 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang penulis peroleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer ini ialah data yang penulis dapatkan pada observasi dan wawancara informan terkait penelitian, kemudian juga berasal dari data dokumentasi yang penulis peroleh selama berlangsungnya penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian yang ada. Data sekunder dapat berupa buku, artikel, laporan penelitian, media cetak dan media online dan berbagai dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, upaya untuk mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti.²⁹ Adapun observasi yang

²⁸ Ali Maksum, *Data Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian* (Bandung: Cakrawala, 2012), 23.

²⁹ Serdamayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 75.

dilakukan dalam penelitian ini yaitu terhadap pelaksanaan berbagai agenda oleh pemerintah Aceh berdasarkan kebijakan dalam mengatasi kemiskinan.

- b. Wawancara, tahapan ini merupakan tahapan kedua dalam pengumpulan data. Dalam tahapan ini, penulis akan menghimpun berbagai informasi dari informan secara langsung. Data yang diperoleh dapat berupa tanya jawab yang dilaksanakan maupun percakapan lainnya yang bersifat penting dan diperlukan untuk menghasilkan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilaksanakan merupakan wawancara terstruktur dikarenakan telah menyusun secara sistematis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua TP2K Aceh (Bappeda), Kepala Dinas Sosial Aceh, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Ketua Komisi V Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan DPR Aceh, Ketua Komisi VI bidang Keistimewaan dan Kekhususan DPR Aceh, 1 orang Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ideas, 2 orang staff TKP2K Aceh serta 7 orang masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
- c. Dokumentasi, merupakan proses pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, artikel, majalah, berita dari media cetak dan media online, laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁰

³⁰ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo: Jakarta, 2010), hal. 116.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, Adapun teknik yang dilaksanakan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun data dilaksanakan dengan tahapan studi pendahuluan. Tahapan ini dilaksanakan guna memverifikasi serta membuktikan bahwa fenomena yang terjadi benar adanya. Dalam tahapan menghimpun data, penulis telah melaksanakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Tahap reduksi data. Dalam tahapan ini, penulis melaksanakan penyederhanaan dan perubahan data yang berbentuk informasi yang masih kasar yang didapatkan saat proses penelitian. Disisi lain, tahapan ini juga menjadi tahapan pemilahan data secara berkelanjutan guna dapat menghasilkan data sebanyak mungkin yang penulis butuhkan.
- c. Tahap penyajian data atau *Data Display*. Dalam tahapan ini, penulis menyusun berbagai informasi yang telah didapatkan dalam penelitian berdasarkan hasil dari tahapan reduksi data. Tahapan ini akan menghasilkan informasi penelitian yang telah tersusun secara ilmiah.
- d. Penarikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan tahap menyimpulkan berbagai informasi dan hasil penelitian untuk dapat dipahami dengan mudah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan akan terfokus kepada instansi pemerintah selaku pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif), LSM serta masyarakat kabupaten kota Aceh sebagai pembanding akan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dan kredibilitas data dalam penulisan ini, penulis menggunakan triangulasi. Adapun triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga) poin untuk menguji keabsahan data penelitian yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi dengan waktu.³¹

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan proses untuk melakukan pengecekan ataupun pengujian terhadap kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ditentukan. Adapun hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dalam bentuk kesimpulan akan dilakukan pengecekan melalui kesepakatan sumber-sumber tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dimaknai dengan suatu proses pengujian kredibilitas data dengan teknik pengecekan terhadap sumber yang sama namun

³¹ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010), 46–62.

menggunakan teknik yang berbeda. Adapun dalam tahapan triangulasi teknik ini, penulis memastikan data yang didapat benar ataupun tidak.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan poin yang sangat dibutuhkan dalam proses memperoleh data yang kredibel, hal ini dikarenakan data yang diperoleh oleh seorang informan dapat berubah-ubah. Oleh karenanya, triangulasi waktu dapat digunakan untuk mengecek kebenaran pada informasi yang diberikan dengan teknik pengumpulan pada waktu dan tempat yang berbeda, sehingga dibutuhkan pengecekan demi data yang valid dan kredibel.³²

H. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab awal yang penulis sajikan dalam penulisan ini. Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang masalah penelitian. Setelah merangkum masalah berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi, penulis melanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penulisan ini. Selanjutnya penulis menyajikan kajian pustaka yang relevan serta kajian teori yang penulis angkat untuk melihat berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu metode penelitian untuk menjelaskan dan mengupas dari permasalahan penelitian. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan yang menjelaskan terkait poin-poin yang dibahas dalam bab tesis ini.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 19 (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 273–274.

Bab II yaitu membahas tentang Kajian Teoritis yang memuat teori Kebijakan Publik serta teori Kemiskinan. Pada bab ini, penulis menyajikan pembahasan dalam teori yang penulis gunakan secara spesifik guna dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis laksanakan.

Pada bab III, yaitu membahas tentang Kondisi Umum Provinsi Aceh. Dalam bab ini, penulis menyajikan terkait kondisi Aceh secara umum yang meliputi data demografi, topologi, ekonomi dan gambaran kemiskinan yang terjadi di Aceh

Bab IV membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana mendeskripsi dan analisis data dari penelitian yang dilakukan. Bab ini ini menggambarkan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan sehingga terjaminnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur. Kemudian membahas tentang implementasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan.

Bab V yaitu bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini, penulis mengemukakan dua poin penting yaitu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran sebagai masukan bagi pihak terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada akhir tesis ini, penulis menyajikan daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan disusun dalam berbagai strategi yaitu Strategi Utama dan Strategi Khusus. Strategi Utama antara lain yaitu: (1) Mengurangi beban penduduk miskin, (2) Meningkatkan pendapatan penduduk miskin, (3) Memperkuat kapasitas penduduk miskin, (4) Menekan biaya transaksi ekonomi, (5) Menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok. Adapun Strategi Khusus yaitu: Tepat Fokus, Tepat Lokus, Tepat Modus, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu.
2. Implementasi kebijakan Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan antara lain yaitu: Bidang ekonomi seperti pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Kawasan, transmigrasi lokal, penyediaan lahan individu, pengadaan sarana dan prasarana teknologi dan sebagainya. Bidang pendidikan didalamnya seperti beasiswa bagi anak/yatim miskin, pembangunan Gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal dan lainnya. Bidang kesehatan seperti jaminan kesehatan masyarakat Aceh, bantuan alat penyandang disabilitas, layanan rujukan rumah sakit dan sebagainya. Bidang pangan seperti pengembangan wilayah Kawasan, pengembangan desa mandiri, operasi pasar dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu bidang infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rumah layak huni dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Aceh yaitu pemangku kebijakan antara lain Eksekutif dan Legislatif untuk dapat mengkaji kembali tentang pelaksanaan kebijakan. Permasalahan kemiskinan menjadi suatu permasalahan kompleks yang multidimensi sehingga diperlukan suatu fokus dalam mengatasinya.
2. Kepada pelaksana kebijakan yaitu TKP2K Aceh dan kabupaten/kota serta SKPA dan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan program yang langsung menyentuh akan kemiskinan di Aceh.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat mengapa Aceh masih dilanda kemiskinan serta mengkaji berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah secara komprehensif.
4. Kepada masyarakat Aceh untuk dapat memanfaatkan setiap bantuan dari pemerintah agar dapat digunakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Ardian, Muhammad, dan Arief Marizki Purba, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Politik," *Perspektif*, 10.2 (2021), 543–54
<<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4780>>
- Arifin, Johan, "Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," *Sosio Informa*, 6.2 (2020), 114–32
- Bachri, Bachtiar S, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010), 46–62
- Badan Pusat Statistik Aceh, "Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh Maret 2022," *BPS Aceh*, 2022
<[https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/702/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2022.html#:~:text=Selama periode September 2021-Maret,menjadi 10%2C31 persen\).](https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/702/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2022.html#:~:text=Selama%20periode%20September%202021-Maret,menjadi%2010%2C31%20persen).>)> [diakses 6 Maret 2022]
- Baykin, M Dul, dan Dini Widinarsih, "Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Muhammadiyah Di Pulau Lombok Ntb Kajian Literatur," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6.3 (2022), 10227–47
<<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3549>>
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1998)
- Fachrudin, Reza, "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan," *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 4.2 (2015), 327–38
- Huraerah, Abu, "Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12.1 (2013), 1–13
- Irwan Abdu Nugraha, "Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Ilmu Politik*, 2017, 19–29
- Istan, Muhammad, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat

- Menurut Perspektif Islam,” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2017), 81–99 <<https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>>
- Itang, “Faktor faktor penyebab kemiskinan,” *Tazkiya*, 16.1 (2015), 1–30
- Jamil, Norzita, dan Siti Hadijah Che Mat, “Realiti kemiskinan: Satu kajian teoritikal,” *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 48.1 (2014), 167–77 <<https://doi.org/10.17576/jem-2014-4801-14>>
- Maksum, Ali, *Data Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian* (Bandung: Cakrawala, 2012)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Martian Ramdani, “Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012,” *Economics Development Analysis Journal*, 4.1 (2017), 58–64
- Maulida, Rizka (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh), dan Diana (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh) Sapha A.H, “Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.3 (2018), 340–49
- Muslimah, Muslimah muslimah, dan Megawati Megawati, “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Perkebunan Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang,” *Jurnal Penelitian Agrisamudra*, 5.2 (2018), 9–15 <<https://doi.org/10.33059/jpas.v5i2.862>>
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2018), 169–88 <<https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>>
- Nasution, L N, D P Nasution, dan A I F Lubis, “Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara,” *JEpa*, 5.1 (2020), 1–5 <<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/856>>
- Nugroho, Riant, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- , *Public Policy* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009)
- Pertiwi, Shinta Yuniana, “Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

- Penanggulangan Kemiskinan,” *Pandecta: Research Law Journal*, 9.2 (2014), 212–25 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3446>>
- Prasetyo, P. Eko, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran,” *Akmenika UPY*, 2 (2008), 1–13
- Purwanto, Erwan Agus, “Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10.3 (2007), 295–324
- Rachman, Nisa Agistiani, “Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut,” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18.2 (2014), 147–60
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo: Jakarta, 2010)
- Rah Adi Fahmi, Ginanjar, Sugeng Setyadi, dan Umayatu Suiro, “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8.2 (2018), 227–48 <<https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>>
- Rianto, M Nur, dan Al Arif, “Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Asy-Syir’ah*, 2.1 (2012), 17–29 <[https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir’ah.2012.%25x](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x)>
- Royat, Sujana, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan,” *Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*, 1, 2007, 41–51
- S Gopal, Parthiban, Muhammad AlNaufal Abdul Rahman, Nor Malina Malek, Paramjit Singh Jamir Singh, dan Law Chee Hong, “Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal,” *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6.1 (2021), 40–51 <<https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608>>
- Satibi, Iwan, dan Undang Sudrajat, “Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO)*, 9.2 (2019), 362–81

- Serdamayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Siregar, N. A, dan Z Ritonga, “Analisis Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan,” *Jurnal Pencerahan*, 8.1 (2018), 15–37
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 19 (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sulhan, Muhammad, dan Totok Sasongko, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang),” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6.1 (2017), 15–18
<<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/365>>
- Suyanto, Bagong, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya* (Malang: In-Trans Publishing, 2013)
- T. Junaidi, dan Mufti Riyani, “Pemetaan Ragam Hias Aceh Dalam Kajian Geografi Budaya Dan Etnografi,” *Jurnal Koridor*, 9.2 (2018), 280–91
<<https://doi.org/10.32734/koridor.v9i2.1369>>
- Talitha Lulu Kharisma, dan Sugiarti, “Representasi Kemiskinan Absolut Tokoh Utama Dalam Novel La Muli Karya Nunuk Y Kusmiana,” *Jurnal Logat*, 9.1 (2022), 52–64
- Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh, *Desk Kemiskinan Satuan Perangkat Kerja Aceh Tahun Anggaran 2022* (Banda Aceh: TKP2K Aceh, 2022)
- , *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019* (Banda Aceh: TKP2K Aceh, 2019)
- , *Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (SP2KA) Tahun 2019-2022* (Banda Aceh: TKP2K Aceh, 2018)
- Wikipedia, “William N. Dunn,” *Wikipedia.com*, 2022
<https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_N._Dunn> [diakses 22 November

2022]

Winarmo, Budi, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014)

Wawancara

Wawancara dengan Prof. Mukhlis Yunus selaku Akademisi Aceh pada tanggal 20 September 2022 pukul 07.00 WIB.

Wawancara dengan Rizal Falevi Kirani selaku Ketua Komisi V DPR Aceh pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Ilham Fardian selaku masyarakat Aceh Jaya pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Dr. Hasrati selaku Ketua TKP2K Aceh pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Teungku Anwar selaku Ketua Komisi VI DPR Aceh pada 17 Oktober 2022 Pukul 19.30 WIB.

Wawancara dengan Munzami HS selaku Direktur LSM IDEAS pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Ramadhan selaku masyarakat Aceh Utara pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB.

Wawancara dengan Muhammad Zikri selaku masyarakat Aceh Utara pada tanggal 11 November 2022

Wawancara dengan Agus Junaidi selaku masyarakat Aceh Utara pada tanggal 18 November 2022

Wawancara dengan Abdul selaku masyarakat Aceh Utara pada tanggal 2 November 2022

Wawancara dengan Muhammad Farhan selaku masyarakat Aceh Utara pada tanggal 6 November 2022

Wawancara dengan Rizki Mubarak Alkam selaku masyarakat Aceh Besar pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Mahdani selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 13.30 WIB

Wawancara dengan Sari Salvia selaku Bidang Program TKP2K Aceh pada tanggal 30 September 2022 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Jufriadi selaku Bidang Data TKP2K Aceh pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.